

## **ABSTRAK**

Achmad Ibnu Aziz : Analisis Kedudukan Anak Akibat Penolakan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2020.

**Kata kunci:** Itsbat Nikah

Didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan pencatatan perkawinan yaitu suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan mensejahterakan warga negaranya. Akan tetapi banyak dari suami istri yang telah menikah tetapi tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memiliki akta nikah padahal Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai bukti sah nya sebuah perkawinan.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana mestinya, Pada umumnya tidak tercatatnya suatu perkawinan terjadi karena ketidakpahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan adanya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) kedudukan anak akibat penolakan permohonan itsbat nikah. (2) pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tentang penolakan itsbat nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ditolaknya itsbat nikah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat formil yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan kasus dan memberikan sumbangan informasi praktik-praktik hukum islam khususnya itsbat nikah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi peneliti-peneliti tentang penolakan permohonan itsbat nikah, dapat dijadikan bahan kajian untuk mencari solusi ilmiah mengenai pencatatan perkawinan.

## **ABSTRACT**

Achmad Ibnu Aziz: Analysis of the Position of Children Due to Rejection of the Request for Marriage at the Semarang Religious Court Ahwal Asy-Syakhshiyah Study Program, Sharia Department, Islamic Faculty of Sultan Agung Islamic University Semarang in 2020.

Key words: determination of marriage

In the Marriage Law Number 1 of 1974, it is stated that marriage registration is a State administration in the framework of creating order and the welfare of its citizens. However, many of the husband and wife are married but do not register their marriage at the Office of Religious Affairs, so they do not have a marriage certificate even though the marriage certificate quotation is an authentic proof that is carried out by a marriage registrar as proof of the validity of a marriage.

The background of the writing of this thesis is the number of marriages that are not recorded properly. In general, the unregistered marriage occurs because of the community's lack of understanding of the importance of marriage registration. The problems raised in this study were (1) the position of the child due to the rejection of the marriage request. (2) legal consideration of the judge's decision regarding the rejection of marriage.

The results showed that the case of rejection of marriage status was due to the failure to fulfill the formal requirements by both parties, and one party was still married to another person as described in Article 3 paragraph (1) of the Marriage Law, which reads "in principle. a man can only have one wife. A woman can only have a husband".

The benefits of this research are expected to be able to contribute insight into cases and provide information on Islamic legal practices, especially marriage rituals. This research is expected to be a scientific reference material for researchers on rejection of marriage requests, and can be used as study material to find scientific solutions regarding marriage registration.